



ADPEL UTAMA TG.PERAK



DISKANLA PROP. JATIM

SERTIFIKAT

diberikan kepada

Bagiyo Swasono

sebagai

Pemakalah

Pada Seminar Nasional Kelautan VI

"GLOBAL WARMING DALAM PERSPEKTIF KELAUTAN: TANTANGAN DAN PELUANG"

Surabaya, 22 April 2010

Rektor Universitas Hang Tuah



Sutarno, dr., Sp.THT., Sp.KL., SH., MH.

Ketua Panitia



Drs. Prajitno, MAP.

Budaya Kerja Dalam Pendidikan Tinggi Sebagai Bentuk Peningkatan Integritas Nasional*

Bagiyo Suwasono

Dosen Tetap Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan, UHT Surabaya 60111
bagiyosuwasono@gmail.com; bagiysuwasono@hotmail.co.id

ABSTRAK

Integritas, memang suatu hal yang menarik untuk dibicarakan. Sejak kecil kita telah didoktrin bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bermartabat, berbudi pekerti luhur dan bermoral tinggi. Namun kenyataan berbicara sebaliknya. Banyak dari kita yang akhirnya berdalih bahwa sakit yang dialami bangsa ini sudah terlalu kronis dan tidak bisa diubah lagi. Apakah memang demikian ? Satu hal yang harus disadari, pemecahan untuk hal yang rumit seringkali berasal dari hal yang sebelumnya kita anggap remeh dan kecil, misalnya dari dalam diri kita.

Sedangkan paradigma baru dalam pendidikan lebih tinggi akan memerlukan suatu pendekatan baru, dimana isu tentang pendidikan yang besar, pembelajaran sepanjang hayat, keterbukaan dalam proses pembelajaran, mutu dan relevansi pendidikan, tanggungjawab dan otonomi pengelolaan pendidikan, dan hak kekayaan intelektual menjadi sesuatu yang sangat penting. Dampak globalisasi memberikan pergeseran peran pendidikan tinggi dari pembelajaran tradisional ke penciptaan pengetahuan, perubahan dari perencanaan acak ke perencanaan strategis, dan pergerakan dari komparatif mendekati ke pendekatan kompetitif.

Wujud penanaman budaya kerja dalam semua aktivitas Pendidikan Tinggi, baik dilaksanakan diluar maupun didalam lingkungan kampus oleh civitas akademika akan dilandasi oleh tingkat penguasaan IPTEKS, etika dan moral untuk meningkatkan semangat iman dan takwa, dan budaya kerja masyarakat plural yang berideologi Pancasila untuk membentuk “jaringan informasi masyarakat akademik dan masyarakat akademik tanpa batas” sebagai bentuk peningkatan integritas nasional.

Kata kunci: *budaya kerja, pendidikan tinggi, integritas nasional*

* Dipublikasikan pada Seminar Nasional Kelautan VI, Global Warming dalam Perspektif Kelautan: Tantangan dan Peluang, UHT Surabaya, 22 April 2010.

I. PENDAHULUAN

Pendidikan telah sangat disadari sebagai alat penting bagi pembangunan dan sebagai bagian dari pembangunan. Pembangunan tidak akan berjalan dan berhasil tanpa melibatkan aktivitas pendidikan yang ditujukan kepada manusia, individu atau kelompok sebagai pelaku pembangunan. Tujuan pendidikan memiliki tujuan yang sama dengan pembangunan, yaitu peningkatan kualitas kehidupan manusia yang memiliki dimensi personal, lokal, daerah, dan nasional. Dengan demikian rancangan dan kebijakan pendidikan dengan sendirinya juga ditujukan bagi kemajuan dan pemenuhan kebutuhan personal, lokal, daerah, dan nasional.

Negara kita sebagai sebuah sistem kesatuan dari keanekaragaman daerah atau wilayah dituntut memiliki kearifan terhadap keharmonisan antara kepentingan nasional, wilayah, dan

lokal. Di sisi lain kita dihadapkan pada tuntutan untuk mengembangkan keharmonisan antara tujuan nasional yang sama dan tujuan wilayah atau lokal sesuai dengan keunikan sosial budayanya. Masuknya kekuatan ekonomi, politik, ilmu dan teknologi, budaya, dan nilai-nilai dari luar melalui arus globalisasi menambah besarnya persolan yang kita hadapi dalam rangka menjaga dan membangun identitas bangsa, kerukunan sosial-budaya daerah dan integritas nasional.

Wujud kongkrit budaya kerja terhadap aktivitas pendidikan tinggi di Indonesia adalah menghasilkan lingkungan akademik yang dilandasi oleh nilai kecerdasan, nilai norma-norma dan nilai kemanusiaan antar sesama. Hasil akhir tulisan ini menjelaskan suatu bentuk model skematis “*archipelagic culture education (ACE)*” dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi sebagai bentuk landasan perilaku bagi setiap sivitas akademika untuk meningkatkan integritas nasional.

II. BUDAYA INDONESIA

Seperti diketahui dengan keragaman etnik dan budaya, Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu bangsa yang paling heterogen di dunia. Keragaman budaya bangsa Indonesia sudah berusia berabad-abad dan berkembang melalui proses interaksi budaya yang natural lewat pertemuan budaya dalam konteks perdagangan atau pertukaran akademik (Yumarna, 1996), sehingga konteks pertemuan budaya Indonesia relatif bersifat mutualisme dan damai. Dibandingkan dengan riwayat pertemuan budaya di negara-negara barat, pertemuan itu terutama dipicu oleh kepentingan ekspansi wilayah. Dengan demikian memiliki sifat agresif dan keras (Bennet, 1993).

Meskipun pertemuan antarbudaya sebagai refleksi sejarah yang dimulai berabad-abad lalu, akan tetapi interaksi yang terjadi pada masa globalisasi ini memiliki kompleksitas yang cukup tinggi. Beban untuk menyelesaikan tugas secara optimal ditambah dengan tuntutan penyesuaian diri dalam konteks budaya yang berbeda sering membawa masalah yang pada akhirnya bermuara pada kegagalan pencapaian tugas. (Panggabean, 2001).

Studi yang dilakukan oleh Hofstede (1997) di IBM dengan melibatkan 50 negara sampel, termasuk Indonesia yang mengikutsertakan 95 orang manajer berhasil menjelaskan bahwa ciri-ciri diskripsi budaya masyarakat Indonesia sebagai masyarakat plural adalah berindeks *power distance* lebar dan *collectivism*. Sedangkan ciri-ciri pokok budaya perusahaan, mencakup (1) budaya organisasi merupakan satu kesatuan yang integral dan saling terkait; (2) budaya organisasi merupakan refleksi sejarah dari organisasi yang

bersangkutan; (3) budaya organisasi berkaitan dengan hal-hal yang dipelajari oleh para antropolog, seperti: ritual, simbol, cerita dan ketokohan; (4) budaya organisasi dibangun secara sosial, dalam pengertian bahwa budaya organisasi lahir dari konsensus bersama dari sekelompok orang yang mendirikan organisasi tersebut; dan (5) budaya organisasi sulit untuk dirubah.

Melalui etika kehidupan berbangsa (*national codes of conduct*) kita mengharapkan agar disiplin dan ahklak hidup berbangsa segera bisa ditegakkan, seiring dengan berjalannya hukum dan supremasi hukum. Budaya malu berbuat salah harus segera kita kembalikan. Budaya nasehat-menasehati, ingat-mengingatkan, memuji yang baik, mencela yang buruk kita tegakkan kembali, yang kalau perlu dengan saksi yang berat bagi yang menyalahinya. Kita ingin mendambakan dan mendambakan sekali sebuah kehidupan yang harmonis, yang berdisiplin yang tertib, yang berbudi dan berbudi luhur. Kita merintih dan menangis dengan kehidupan kita seperti sekarang ini, yang hidup nyaris hidup kalang kabut dan porak poranda tanpa norma, dimana nilai-nilai luhur sudah terkesampingkan budaya malu telah berganti dengan kenekatan dan kesemena-menaan dan hukum telah berganti dengan anarki. Kitapun seperti sekarang nyaris tidak lagi memiliki negarawan yang berahklak tinggi dan sosok-sosok pemimpin yang menjadi suri tauladan (Naim, 2000).

Sedangkan studi yang dilakukan oleh Panggabean (2001) pada salah satu kompetensi yang dianggap signifikan bagi keberhasilan penyesuaian diri dan pencapaian tugas individu dalam kerjasama antarbudaya adalah *interculture sensitivity* (ICS). Penggalan karakteristik ICS dengan video kelompok kerja monokultural Indonesia, monokultural Jerman dan campuran Indonesia – Jerman menunjukkan salah satu karakteristik ICS orang Indonesia yang dinamakan *active sensitivity* mengacu pada bentuk kepekaan yang luwes, kreatif dan berorientasi pada hasil. *Active sensitivity* bersifat konstruktif dan produktif bagi pencapaian tugas. Apabila kompetensi ini dapat dikembangkan secara sistematis, *active sensitivity* dapat menjadi salah satu modal bangsa Indonesia dalam menghadapi persaingan global dalam dunia kerja.

Dalam sambutan Rektor ITB (Kadiman, 2003) menyatakan hari ini masyarakat kita telah belajar bahwa perjalanan bangsa ini menuju pencapaian cita-citanya membutuhkan kekuatan dan kemampuan dari segenap anak-anak bangsa dan seluruh komponen masyarakat di Tanah-Air. Persoalan sosial, politik, dan budaya yang diimbaskan oleh gejolak global, maupun yang berasal dari perjalanan sejarah kita, telah menghadirkan sebuah tantangan besar, yang untuk menjawabnya diperlukan penerahan segenap kemampuan anak-anak bangsa

secara bahu-membahu. Kebijakan-kebijakan pemerintah berkenaan dengan otonomi, baik otonomi pemerintahan daerah, otonomi badan-badan usaha milik negara, maupun otonomi perguruan tinggi, mencerminkan kesadaran pemerintah dan rakyat akan pentingnya partisipasi segenap masyarakat dalam menghela 'kereta pembangunan bangsa'. Jika di masa lalu kita menguji-coba pendekatan hirarkis dan sentralistik dalam memperkokoh kesatuan bangsa, ke depan tampaknya pendekatan ini akan mengarah pada bentuk-bentuk *network*. Pemikiran ke arah bentuk-bentuk pranata sosial baru, sistem pemerintahan baru juga semakin intensif dikerahkan di berbagai bangsa-bangsa lain. Gagasan tentang *network society*, *information society*, *borderless society* mengindikasikan perkembangan tersebut. Gagasan dasarnya sederhana: kita percaya bahwa potensi insani setiap individu itu sangatlah besar. Namun, potensi besar ini hanya bisa beralih-bentuk melalui hubungan-hubungan dengan individu-individu lain. Oleh karena itu, pelepasan potensi insani individu mempersyaratkan fleksibilitas dan vitalitas hubungan-hubungan antar individu. Sebuah pranata sosial yang membatasi hubungan-hubungan ini, pada dasarnya akan membatasi pula pelepasan potensi-potensi individu. Gagasan ini berlaku pula pada entitas-entitas sosial (seperti lembaga-lembaga, badan-badan, negara-negara). Pada saat yang sama, ini menghadirkan tantangan baru dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan, membangun pranata sosial-budaya, merumuskan hukum dan perundang-undangan.

Kesesuaian dan keserasian budaya adalah penting untuk diperhatikan oleh setiap pimpinan dalam mengimplementasikan berbagai teknik dan praktek manajemen SDM dalam suatu organisasi/perusahaan. Demi mencapai keberhasilan program, teknik, dan proses manajemen SDM, setiap pimpinan organisasi/perusahaan harus memperhatikan norma, keyakinan, dan nilai budaya kerja masyarakat di mana organisasi/perusahaan tersebut beroperasi. Program dan praktek yang konsisten dan berakar dalam nilai dan norma budaya akan sukses dan berkesinambungan. Oleh karena itu, praktek ilmu manajemen SDM perlu dimodifikasi dan harus beradaptasi disesuaikan dengan nilai budaya dan keyakinan masyarakat setempat. Artinya, pimpinan organisasi/perusahaan harus mempertimbangkan segi-segi kritis dari budaya kerja masyarakat setempat yang memungkinkan untuk dapat memfasilitasi adopsi secara efektif praktek dan teknik manajemen SDM dari negara maju.

Menurut Kodrari orang nomor satu di BTN menjelaskan bahwa selain teknis perbankan dan *knowledge* yang terkait dengan bisnis, Bank BTN juga membuat program pelatihan mental dan spritual karyawannya. "Selain pendekatan *skill* dan teknis, kami juga melakukan pendekatan etik dan moral untuk meningkatkan semangat iman dan takwa pada

karyawannya”. Beliau menekankan filosofi bekerja di BTN ibarat mengemban ajaran agama (Nasution, 2005).

Sedangkan di sisi yang lain, menurut mantan Mendiknas Bapak Fuad Hasan (2006) bahwa berbahasa bisa dianggap sebagai pantulan berfikir, kecerobohan berbahasa mengisyaratkan kecerobohan berpikir pula; dan kalau pikiran dan penalaran (*logos*) dipandang sebagai daya untuk menemukan ketertiban tentang kenyataan yang masih kacau (*chaos*), maka bahasa sebagai pengutara *logos* harus berperan sebagai penertib *chaos*. Melalui bahasa sejumlah persepsi tentang apa yang nyata (*real*) dapat dirangkum menjadi konsepsi sebagai gagasan (*idea*) yang bermakna. Ada benarnya juga pernyataan seorang ahli linguistik terkemuka, Otto Jespersen, bahwa "*man is a classifying animal*" oleh kesanggupannya berbahasa. Karena setiap karya ilmiah diandalkan pada arus pemikiran dan penalaran yang jernih dan runtut, maka penggunaan bahasa yang cermat, jelas dan lugas tetap dipersyaratkan untuk menilai sesuatu karya ilmiah. Begitulah penilaian setiap skripsi, tesis dan disertasi sebagai karya tulis bagi pengakhiran suatu tahap studi untuk memperoleh gelar kesarjana harus meliputi aspek kebahasaannya. Bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah bukanlah bahasa yang sulit dan rumit, melainkan bahasa yang jelas dan lugas.

III. PENDIDIKAN TINGGI INDONESIA

Mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 pada Pasal 1 menyebutkan bahwa Pendidikan tinggi adalah kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian. Sedangkan pada Pasal 3 menyebutkan bahwa hasil lulusan program sarjana memiliki kualifikasi untuk mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat.

Sementara itu Bangsa Indonesia dalam langkah rekonstruksi ekonomi, sosial, dan sistem politik pada masa krisis untuk memperoleh dana publik, sub sektor pendidikan tinggi harus bersaing dengan menekan banyak sektor, seperti pendidikan dasar, pengentasan kemiskinan, dan kesehatan. Walaupun keadaan mendesak untuk prioritas sektor ini tak dapat dipungkiri, maka akan muncul kelalaian dan ketidakcukupan dukungan untuk pendidikan tinggi sebagai harga bangsa terhadap daya saing nasional (Solow, 2001). Pertimbangan paling kuat untuk alokasi dana publik ke pendidikan tinggi adalah kontribusinya kepada daya saing

nasional, kritisi pengetahuan dalam pengendalian ekonomi. Kontribusi penting lainnya adalah perannya dalam mendukung pendidikan dasar dan menengah, terutama kualitas guru. Pertimbangan yang ketiga untuk alokasi dana publik adalah campurtangan mekanisme pasar ke pendidikan tinggi bukan dalam hal potensi akademik tetapi pada keadaan yang merugikan keuangan siswa (Salmi, 2002).

Apabila mengacu pada dokumen Strategi Jangka Panjang Pendidikan Tinggi 2003-2010 (Brodjonegoro, 2003), pengembangan pendidikan tinggi diarahkan pada tiga isu utama yaitu peningkatan daya saing bangsa, otonomi pengelolaan pendidikan dan peningkatan kesehatan organisasi penyelenggara pendidikan tinggi. Sejalan dengan strategi ini, optimasi pembinaan dan pengembangan pendidikan tinggi akan dilakukan melalui penataan sistem manajemen pendidikan tinggi yang mampu merangsang kinerja kolektif perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu yang berkelanjutan berdasar evaluasi diri, asas otonomi, akuntabilitas, dan akreditasi.

Berkaitan dengan misi menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia (MRPTNI, 2003), memberikan beberapa isu strategis bersama tentang upaya untuk pemecahannya, diantaranya adalah: (1) Persaingan global menyebabkan isu kualitas menjadi sangat relevan, terutama diperhadapkan dengan kemampuan pembiayaan pemerintah yang semakin kecil. Oleh karena itu, sudah saatnya kita membebaskan sebahagian pembiayaan pendidikan tinggi kepada masyarakat, dengan tetap menjaga akses kelompok ekonomi lemah, melalui subsidi silang, program bea siswa, dan lainnya. Disadari bahwa kebijakan ini merupakan langkah yang kurang populer, tetapi harus dilakukan untuk mencegah Perguruan Tinggi Indonesia meluncur ke jurang kehancuran, (2) Kesenjangan antara Perguruan Tinggi merupakan potensi ancaman terhadap persatuan bangsa yang dapat memicu disintegritas bangsa. Untuk mengatasi ancaman tersebut diperlukan program terobosan antara lain berupa interkoneksi akademik (*resource sharing*) dalam bentuk pengelolaan bersama Pascasarjana dan Program Studi lainnya, baik secara konvensional maupun dengan *e-learning*, serta pengelolaan sistem kredit secara bersama antar Perguruan Tinggi Negeri, (3) Untuk meningkatkan kualitas lulusan Perguruan Tinggi Negeri, diperlukan beberapa pergeseran kebijakan atau paradigma, seperti reorientasi kebijakan pendidikan kearah *student-based oriented*, yang memosisikan mahasiswa sebagai subjek pendidikan, bukan lagi sebagai objek pendidikan semata; pergeseran “format” dari lembaga struktural birokratis menjadi lembaga fungsional, inovatif dan kreatif, merajut partnership yang sifatnya mendunia, reformasi bentuk organisasi Perguruan Tinggi konvensional yang *rigid* dan disekat kapling tugas yang kaku

menjadi organisasi Perguruan Tinggi yang fungsional, cepat, terbuka, lentur, fleksibel, inovatif, kreatif dan selalu menekankan pada pengembangan mutu yang berkelanjutan; mengutamakan aset intelektual dan kepakaran ketimbang aset fisik dan memusatkan diri pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan; adanya pola yang mengharuskan sivitas akademika ke luar kampus untuk mengikuti pelatihan dan ditantang untuk tidak lagi memisahkan dunia kerja dengan dunia kampus.

Sedangkan di sisi yang lain, penguasaan ilmu tidak pernah mencapai titik terminal, apalagi kesimpulan yang final. Maka setiap ilmuwan tidak akan pernah membuat klaim bahwa pikiran dan pendapatnya berlaku absolut. Ini berarti bahwa setiap tahap dalam studinya harus tersedia aperture bagi ilmuwan lain untuk memberikan kritik dan melaksanakan studi atau penelitian lanjutannya. Demikianlah setiap akademikus harus menghindarkan diri dari kesan arogansi, bahwa seolah-olah pikiran dan pendapatnya adalah yang paling unggul, apalagi sepenuhnya kedap-gagal (*fail-proof*). Sebab betapapun cermatnya sesuatu studi, tidak mungkin sifatnya serba mencakup segala aspek gejala atau peristiwa yang menjadi sasarannya, kendatipun studi itu dilakukan secara *multi-* atau *inter-disipliner*. Setiap studi merupakan tahap yang membuka kemungkinan bagi dilakukannya studi lanjutannya. Sejarah perkembangan ilmu sepanjang zaman menunjukkan betapa ilmu terus berkembang atas kemekarannya sendiri seolah-olah ad infinitum. Maka setiap akademikus harus senantiasa mempertahankan sikap rendah-hati, betapapun gemilang hasil studinya. sebab dalam perkembangan ilmu berlaku ungkapan “*every end is a new beginning*” (Hasan, 2006).

IV. INTEGRITAS NASIONAL

Melihat Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (United Nations Convention On the Law of the Sea-UNCLOS) yang mengukuhkan Indonesia sebagai negara kepulauan dan Deklarasi Bunaken tanggal 26 September 1998 yang intinya meminta agar visi pembangunan dan integritas bangsa berorientasikan kepada kelautan, maka dua pertiga wilayah kedaulatan Indonesia merupakan wilayah laut dan konsekuensi dari posisi Indonesia memerlukan kepedulian yang tinggi khususnya dalam pengelolaan dan pengamanan laut beserta segala isinya yang hendak diabdikan sebesar-besarnya kepada kepentingan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Departemen Luar Negeri saat ini secara proaktif tengah melakukan berbagai perundingan penetapan batas wilayah laut dengan negara-negara tetangga yang menyangkut batas laut wilayah, landas kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif dengan negara-negara yang

berbatasan dengan Indonesia. Mengutip artikel Prof. Rokhmin Dahuri di media massa (Kompas), Deplu sebagai Leading Agency dalam hal ini harus didukung secara penuh oleh instansi terkait, utamanya Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Perhubungan, TNI Angkatan Laut, Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi, BPPT, Bakosurtanal, LIPI, dan dunia akademik. Departemen Luar Negeri juga menyadari perlunya suatu big push dan leadership dari pemerintah untuk terciptanya suatu grand strategy guna mewujudkan reorientasi paradigma pembangunan nasional dari basis daratan ke basis kelautan. Penyelesaian permasalahan kelautan tidak bisa bersifat sektoral, *parsial*, dan bahkan *case by case* karena akan mengakibatkan berbagai kerugian bagi bangsa kita yang tidak hanya ditinjau dari satu aspek semata, namun juga meliputi semua aspek: politik, hukum, pertahanan dan keamanan, serta sosial-budaya. Oleh karena itu, belum adanya suatu kebijakan kelautan nasional yang komprehensif dan integratif merupakan kendala besar dalam menghadapi berbagai tantangan seperti adanya klaim tumpang tindih atas wilayah laut yang berpotensi menimbulkan konflik dengan negara tetangga, termasuk rawan bagi kegiatan-kegiatan penyelundupan, *illegal fishing*, dan sebagainya (Damen, 2005).

Dalam mendorong terwujudnya Sistem Integritas Nasional akan diperlukan sebuah organisasi independen dan terbuka bagi setiap penduduk. Oleh karena itu dipandang perlu untuk mendirikan organisasi dengan kesadaran dan kepedulian dengan mendorong praktek-praktek yang bersih dan sehat di bidang bisnis, pemerintahan, dan masyarakat dalam arti seluas-luasnya. Transparansi merupakan konsep yang maknanya lebih luas dari sekedar keterbukaan. Transparansi adalah keterbukaan yang sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Disadari bahwa proses mewujudkan masyarakat yang transparan memerlukan komitmen yang kuat dari semua lapisan masyarakat. Proses ini perlu secepatnya dimulai dan dilaksanakan secara bertahap dengan memprioritaskan sektor-sektor yang secara langsung berhubungan dengan kepentingan publik. Dalam hubungan ini momentum reformasi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, untuk menciptakan iklim yang kondusif ke arah terwujudnya Sistem Integritas Nasional (Masyarakat Transparansi Indonesia ,1999).

Menurut Wirosardjono (2003) dalam hakekatnya membangun adalah upaya untuk mempersiapkan manusia menghadapi imperatif perubahan. Karena, suka atau tidak suka, dirancang atau tidak dirancang, perubahan akan dihadapi oleh manusia. Perubahan itu terjadi

pada diri manusia sendiri, pada lingkungan masyarakat di mana ia berada dan pada tuntutan-tuntutan agar ia bisa mempertahankan, menjaga dan meningkatkan survivalnya. Proses dan akibat perubahan itu akan dihadapi oleh semua manusia dan seluruh anggota masyarakat. Ada dua pilihan bagi manusia dalam menghadapi imperatif perubahan ini. Pilihan pertama, membiarkan perubahan itu terjadi sesuai kodratnya dan manusia menerima saja keharusan dan akibat perubahan itu, dan menyerahkan semuanya pada kehendak 'nasib'. Atau, berikhtiar menyongsong perubahan itu dengan tekad untuk tetap bisa menguasai arah, mutu serta terpeliharanya tujuan hidup. Kita, bangsa Indonesia, berketetapan untuk menghadapi imperatif perubahan itu dengan ikhtiar, melalui upaya pembangunan. Kita ingin agar arah, dinamika dan gejolak yang inherent dalam setiap proses perubahan dapat sejauh mungkin dikuasai dan dikendalikan. Tergantung dinamika internal dan dinamika eksternal yang dihadapi oleh manusia dan masyarakat, perubahan bisa berjalan cepat atau lambat, lebih bergejolak atau kurang bergejolak, arahnya menuju ke sasaran yang lebih maju dan moderen, atau bahkan mundur atau makin terbelakang. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola perubahan itu, kita sebagai individu, masyarakat atau negara sebagai pengembal amanat rakyat ?

Sedangkan menurut Riza (2005) bahwa integritas tinggi mutlak diperlukan dalam setiap gerak pembangunan. Apapun baiknya suatu sistem dalam rangka pembangunan bangsa tidak akan berjalan baik tanpa integritas tinggi dari aparaturannya. Integritas, memang suatu hal yang menarik untuk dibicarakan. Sejak kecil kita telah didoktrin bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bermartabat, berbudi pekerti luhur dan bermoral tinggi. Namun kenyataan berbicara sebaliknya. Banyak dari kita yang akhirnya berdalih bahwa sakit yang dialami bangsa ini sudah terlalu kronis dan tidak bisa diubah lagi. Apakah memang demikian ? Satu hal yang harus disadari, pemecahan untuk hal yang rumit seringkali berasal dari hal yang sebelumnya kita anggap remeh dan kecil, misalnya dari dalam diri kita. Maka itu mulailah sekarang kita mengubah sikap. Jika dahulu segala hal buruk seringkali dibenarkan, kini saatnya kita tinggalkan dan segala hal baik yang dahulu ditekankan untuk tidak dilakukan kini mulai dikumandang.

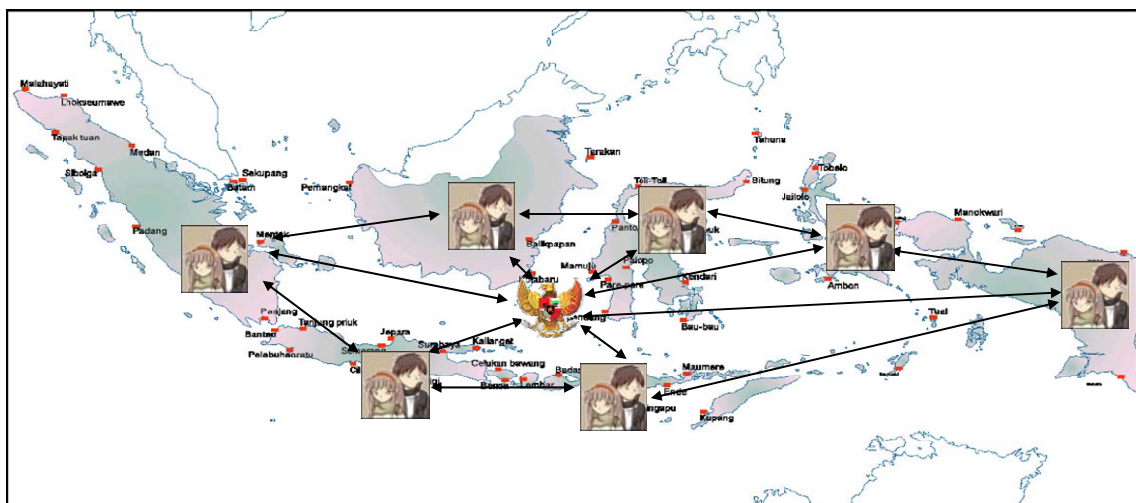
V. MODEL BUDAYA KERJA PENDIDIKAN TINGGI INDONESIA

Berdasarkan kajian dan justifikasi teoritis tentang Budaya Indonesia, Pendidikan Tinggi Indonesia dan Integritas Nasional, maka dikembangkan suatu model skematis Budaya Kerja

Pendidikan Tinggi Indonesia yang disebut sebagai *archipelagic culture education (ACE)*.

Secara filosofi, model skematis ACE pada Gambar 1 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Keragaman etnik dan budaya bangsa Indonesia (salah satu bangsa yang paling heterogen di dunia) sudah berusia berabad-abad dan berkembang melalui proses interaksi budaya yang natural lewat pertemuan budaya dalam konteks perdagangan atau pertukaran akademik yang relatif bersifat mutualisme dan damai. Oleh karena itu, ciri-ciri lingkungan sosial budaya Indonesia sebagai negara berkembang dan masyarakat plural dapat dikatakan relatif tinggi dalam menghindari ketidakpastian dan jarak kekuasaan. Sedangkan dapat dikatakan relatif rendah pada individualisme dan maskulin serta berorientasi pada jangka pendek.
2. Pertemuan antarbudaya sebagai refleksi sejarah dan gejolak globalisasi yang memiliki kompleksitas cukup tinggi dalam persoalan sosial, politik, budaya, pertahanan dan keamanan wilayah negara Indonesia akan memerlukan penerahan segenap kemampuan anak-anak bangsa yang menempa ilmu di Pendidikan Tinggi untuk membentuk “Jaringan Informasi Masyarakat Akademik dan Masyarakat Akademik Tanpa Batas” sebagai bentuk peningkatan integritas nasional.



Ideologi Pancasila mendasari Perilaku Bhinneka Tunggal Ika Indonesia.



Kecerdasan otak diisi dengan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) berbasis kepulauan.



Kepekaan hati diisi dengan nilai spritual dan kebanggaan identitas bangsa Indonesia.



Lulusan Pendidikan Tinggi memiliki kualifikasi untuk mampu bersikap dan berperilaku Bhinneka Tunggal Ika dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat global.

Gambar 1. Model Skematis “ACE”

3. Persaingan global menyebabkan kualitas lulusan Pendidikan Tinggi di Indonesia menjadi sangat relevan. Oleh karena itu, semua sivitas akademika harus dibekali dengan pendekatan *hardskill* dan *lifeskill* untuk penguasaan terhadap IPTEKS, pendekatan *softskill* dalam wujud etik dan moral untuk meningkatkan semangat iman dan takwa, serta pendekatan nilai budaya kerja masyarakat Indonesia sebagai negara kepulauan dengan visi keseimbangan pembangunan dan integritas bangsa yang berorientasikan kepada lautan dan daratan.
4. Hakekatnya membangun adalah upaya untuk mempersiapkan manusia menghadapi imperatif perubahan. Karena, suka atau tidak suka, dirancang atau tidak dirancang, perubahan akan dihadapi oleh manusia. Untuk itu integritas tinggi mutlak diperlukan dalam setiap gerak pembangunan. Apapun baiknya suatu sistem dalam rangka pembangunan bangsa tidak akan berjalan baik tanpa integritas tinggi dari sumberdaya manusia Indonesia yang memiliki kecerdasan, kepekaan hati dan sikap serta perilaku Bhinneka Tunggal Ika dengan dilandasi oleh Ideologi Pancasila.

Ditegaskan oleh filosof pendidikan John Dewey, pendidikan (dan IPTEKS bangsa sebagai buahnya) merupakan sarana yang mendasar bagi perubahan sosial, dan pencapaian aspirasi bersama anggota-anggota masyarakat. Sedangkan Bapak pendidikan nasional kita, Ki Hajar Dewantoro, melontarkan kaidah “Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani”, yang menegaskan akan pentingnya kesinambungan dan kolektifitas dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dengan menangkap kedua pesan dari para pendahulu dan filosofi dari ACE model, kita bulatkan tekad dan teguhkan niat secara bersama-sama, bahu-membahu memperkokoh proses pendidikan bagi anak-anak bangsa guna memberdayakan IPTEKS dengan cerminan budaya kerja negara kepulauan Indonesia sebagai bentuk penerang dan pemandu dalam mewujudkan cita-cita integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kita cintai.

IV. KESIMPULAN

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan visi keseimbangan pembangunan dan integritas bangsa yang berorientasikan kepada lautan dan daratan akan memerlukan anak-anak bangsa yang memiliki (1) tingkat penguasaan IPTEKS, (2) etika dan moral untuk meningkatkan semangat iman dan takwa, dan (3) nilai budaya kerja masyarakat plural yang berideologi Pancasila.

Pertemuan antarbudaya sebagai refleksi sejarah dan persaingan globalisasi yang memiliki kompleksitas cukup tinggi dalam persoalan sosial, politik, budaya, pertahanan dan keamanan wilayah negara Indonesia akan memerlukan penerahan segenap kemampuan anak-anak bangsa yang menempa ilmu di Pendidikan Tinggi untuk membentuk “Jaringan Informasi Masyarakat Akademik dan Masyarakat Akademik Tanpa Batas” sebagai bentuk peningkatan integritas nasional.

V. DAFTAR PUSTAKA

1. Bennet, M., 1993, Toward Ethnorelativism: A Development Model of Intercultural Sensitivity. In R.M. Paige, *Education for The Intercultural Experience*, Maine, Intercultural Press. Inc, pp. 21 – 71.
2. Brodjonegoro, S. S., 2003, *Basic framework for higher education development: KPPTJP IV (2003-2010)*, Dirjen Dikti, Jakarta.
3. Damen, N. T., 2005, *Studi Kebijakan Kelautan Indonesia dalam rangka mendukung Pembangunan dan Integritas Nasional*, Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Departemen Luar Negeri - Republik Indonesia
4. Hasan, F., 2006, *Catatan Perihal Pendidikan Tinggi*, Dies Natalis ke-56, Universitas Indonesia.
5. Hofstede, G., 1997, *Culture and Organizational Software of the Mind*, McGraw-Hill, New York.
6. Iswanto, Y., 2005, Keserasian Budaya Pada Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia, *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol. 1, No. 1, pp. 22 – 31.
7. Kadiman, K., 2003, IPTEKS, Pendidikan Tinggi, dan Reformasi Sosial : Sebuah Retrospeksi, Sambutan Rektor pada Wisuda ITB, Bandung.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tentang: Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
9. MRPTNI, 2003, *Hasil-hasil Kegiatan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia*, Universitas Hasanuddin.
10. MTI, 1999, *Transparansi*, The Indonesian Society for Transparency, <http://www.transparansi.or.id>
11. Naim, M., 2000, *Pendapat Fraksi Tentang Rancangan Ketetapan-ketetapan MPR dan Pembentukan Sub Komisi*, F-PBB, Risalah Rapat Komisi B ke – 3, Sidang Tahunan MPR.

12. Nasution, P. & Arip, W., 2005, *Pengetahuan Teknis dan Iman Landasan Kerja*, Bisnis Bank, Vol. 1, No. 1., pp. 10 – 11.
13. Panggabean, H., 2001, *Characteristics of Interculture Sensitivity in Indonesia – German Work Groups*, Dissertation, Regensburg University.
14. Riza, Y., 2005, *Membentuk Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Bermoral*, Project Manager Seminar Nasional Membangun Integritas 2005, Ikatan Alumni STKN-STAN- Prodip Keuangan bersama ISMMED, BPPK Jakarta.
15. Salmi, J., 2002, *New challenges for tertiary education: The World Bank Report*, International Higher Education, summer 2002, Boston College.
16. Solow, R.M., 2001, *Applying growth theory across countries*, World Bank Economic Review 2001 (2), in *Constructing knowledge societies: new challenges for tertiary education*, World Bank Strategy, Volume II, Education Group – Human Development Network, World Bank.
17. Wirosardjono, S., 2003, *Keswadayaan Dalam Perspektif*, *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Artikel Th II, No. 3, www.ekonomirakyat.org
18. Yumarma, A., 1996, *Unity in Diversity: A Philosophical and Ethical Studi of The Javanese Concept of Keselarasan*, Dissertation, Rome Centre “Culture and Religions” – Pontifical Gregorian University.